

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	4
1.3 Isu-isu Strategis .....	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	24
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	25
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.2 Efisiensi Anggaran.....	55
3.3 Inovasi.....	57
3.4 Penghargaan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Rekomendasi .....	59
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	
RKT .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Cascading Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 .....	5
Tabel 1.2 :	Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal .....	6
Tabel 1.3 :	Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	14
Tabel 1.4 :	Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	14
Tabel 1.5 :	Jumlah PNS Berdasarkan Usia .....	15
Tabel 1.6 :	Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2023 .....	15
Tabel 1.7 :	Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kendal .....	17
Tabel 2.1 :	Tujuan dan sasaran kinerja Jangka Menengah .....	24
Tabel 2.2 :	Perencanaan Kinerja Tahun 2023 .....	25
Tabel 2.3 :	Target Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 .....	26
Tabel 2.4 :	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	28
Tabel 3.1 :	Capaian kinerja tahun 2023 .....	31
Tabel 3.2 :	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 .....	31
Tabel 3.3 :	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	46
Tabel 3.4 :	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra) .....	48
Tabel 3.5 :	Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional .....	49
Tabel 3.6 :	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023 .....	49
Tabel 3.7 :	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	50
Tabel 3.8 :	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	51
Tabel 3.9 :	Laporan Realisasi Keuangan .....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Rasio Jumlah PNS BPBD Kab Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin 13

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 050/2601/BPBD tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL



**ALI SUTARIYO, S.T., M.A.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700505 199803 1 012

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Wilayah Kabupaten Kendal secara geografis, geologis, hidrologis dan klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman bencana. Kondisi alam seperti ini menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana, baik yang berasal dari ancaman banjir, kebakaran, angin putingbeliung dan lain-lain. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan upaya peningkatan kapasitas semua stakeholder baik dari unsur pemerintah, masyarakat, civil society maupun pihak swasta sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Selain itu, berbagai pengalaman sejarah kebencanaan di Kabupaten Kendal memberikan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk mengembangkan kebijakan yang sistematis berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa

pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023;
2. Mendorong BPBD Kabupaten Kendal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja;
4. Memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan efektif menuju nol korban bencana.

## **1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

### **1.2.1 Mandat Kinerja**

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization organisasi berbasis kinerja, maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal merupakan bentuk keseriusan dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 :

Tabel 1.1 Cascading Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</p>	
<p>Sasaran 1</p> <p>Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Sasaran 2</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>
<p>Sasaran Program</p> <p>Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana di Kab. Kendal</p> <p>Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kendal</p> <p>Terlaksananya pemulihan Pasca bencana di Kabupaten Kendal</p>	<p>Sasaran Program</p> <p>Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah</p>

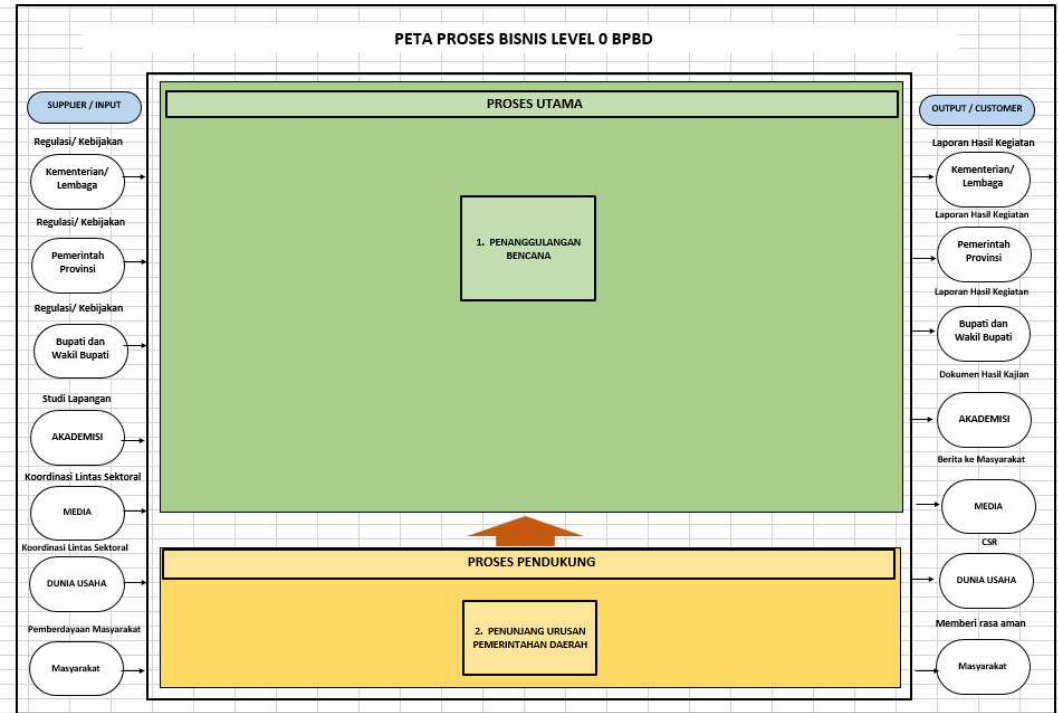
### 1.2.2 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Ferormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

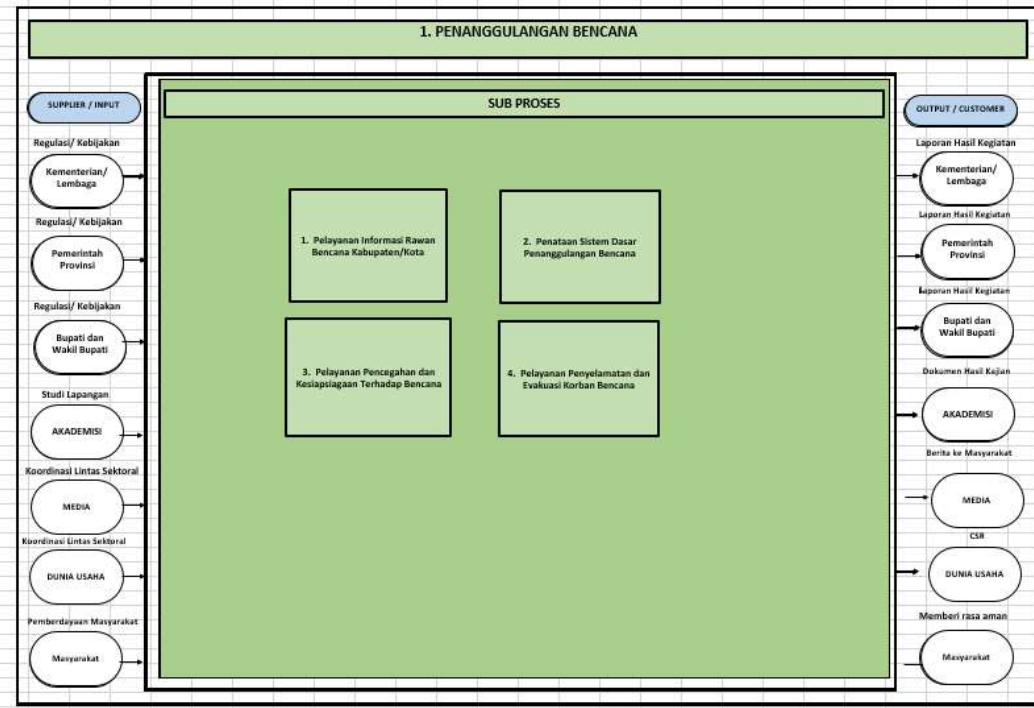
Penyusunan peta proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Tabel 1.2. Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP  
1. PENANGGULANGAN BENCANA

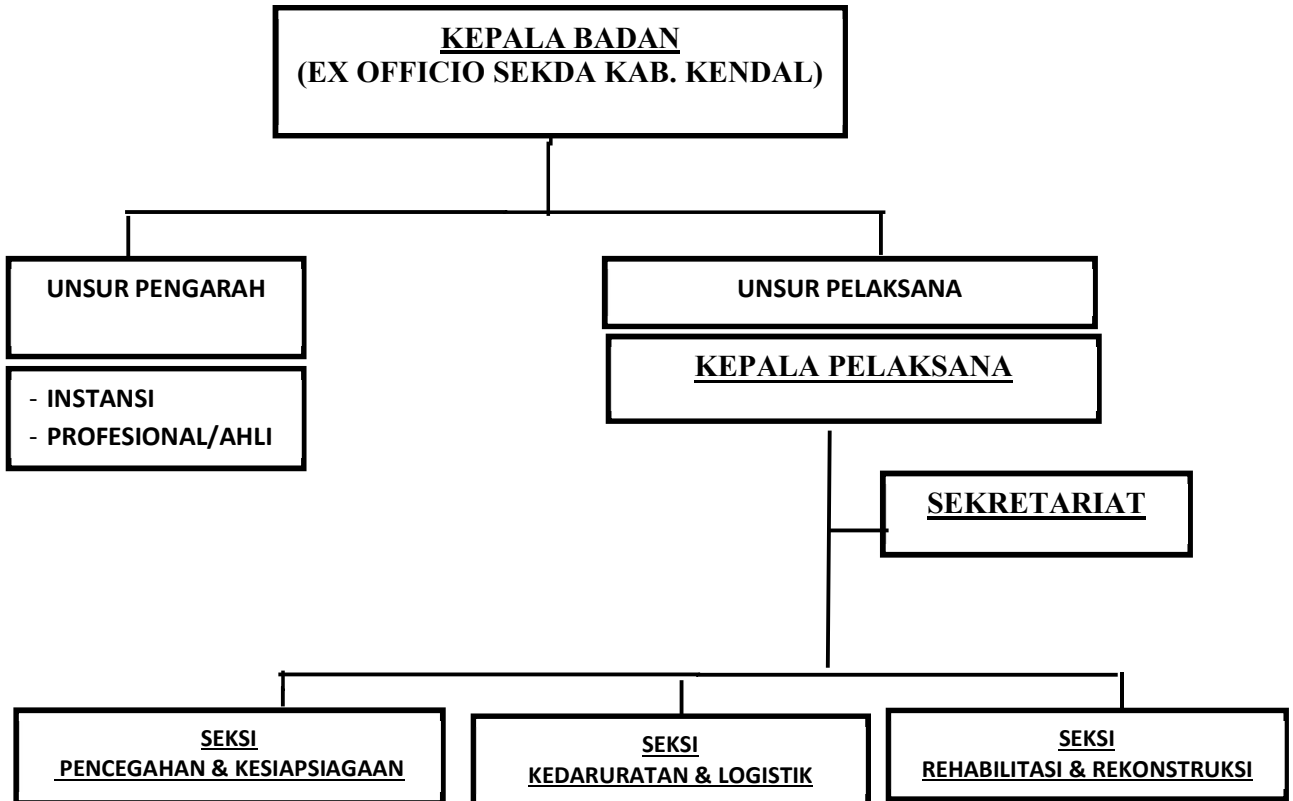


### 1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sasaran kegiatan meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya sasaran kegiatan tersebut menjadi tahapan penanggulangan bencana.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan susunan struktur organisasi dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdapat tiga unsur utama tugas pokok BPBD yaitu kegiatan pencegahan Bencana (Mitigasi), Penanganan Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal telah selesai menyusun Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Dukungan

penyediaan anggaran sebagai upaya mitigasi seperti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bencana, Penguatan Kapasitas masyarakat di Kawasan rawan bencana melalui kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana secara terus menerus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. Unsur penanganan bencana dalam melaksanakan kegiatan senantiasa menerapkan kecepatan (Quick Respon) dalam upaya penanggulangan di setiap kejadian bencana sebagai upaya meminimalisir jumlah korban bencana. Dukungan melaksanakan kegiatan tersebut melalui penjaringan informasi kejadian bencana melalui informasi yang terdapat pada Media sosial maupun informasi melalui jaringan Media sosial yang di bentuk oleh BPBD Kab Kendal seperti grup whatshapp Penanggulangan Bencana daerah dari Unsur Kepala Desa seluruh Kabupaten Kendal sebagai Pimpinan pada tingkat desa, relawan penanggulangan bencana melalui wadah Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB). Untuk upaya penanganan bencana BPBD berkerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk Relawan Bencana yang terbentuk di dalam wadah organisasi maupun relawan individu yang terbangun dalam Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Dengan sinergitas tersebut menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Unsur Rehabilitasi dan Rekontruksi dilakukan upaya percepatan rehabilitasi sarana umum dan korban terdampak bencana dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebagai pengampu kegiatan fisik rekonstruksi maupun rehabilitasi.

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal antara lain:

1. Perlu peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan;
2. Belum optimalnya implementasi manajemen kebencanaan dengan dokumen pendukung pada saat penanganan bencana;
3. Belum optimalnya pendanaan penanggulangan bencana;
4. Sebagian peralatan penanggulangan bencana masih melalui mekanisme hibah dari pusat;
5. Belum maksimalnya koordinasi stakeholder kebencanaan di Kabupaten Kendal;
6. Sarana dan prasarana belum memadai sebagai pendukung penanggulangan bencana.

#### **1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Untuk mendukung kinerja pelayanan penanggulangan bencana dan memberikan Gambaran umum mengenai potensi dan kompetensi

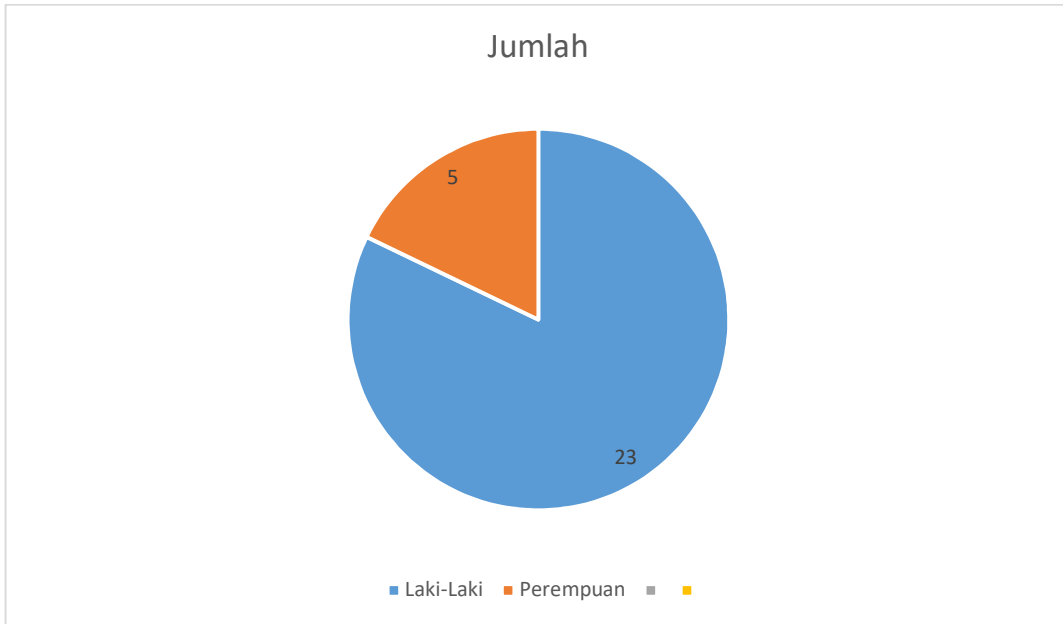
yang dimiliki oleh ASN dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penambahan personil melalui mekanisme PPPK;
- b. Meningkatkan kualitas layanan melalui pengintegrasian internet, single base data dan digitalisasi dokumen pelaporan dan arsip;
- c. Pelaksanaan rapat-rapat melalui zoom meeting;
- d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis melalui blended learning;
- e. Pengiriman personil pada Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh instansi provinsi dan pusat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari Sekretariat dan 3 seksi dengan personil 13 PNS, 15 PPPK Pranata Pencarian dan Pertolongan, 10 Satgas Penanggulangan Bencana serta 1 personil petugas kebersihan. Data sarana prasarana dan data kepegawaian yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan gambaran lengkap struktur sebagai berikut :

Gambar 1.1 Rasio Jumlah PNS BPBD Kab Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : *Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2023*



Tabel 1.3 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

<b>Golongan</b>	<b>Laki - Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
I	0	0	0
II	0	2	2
III	9	1	10
IV	1	0	1
Pemula	13	2	15
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2023

Tabel 1.4 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
SD	0	0	0
SMP	0	0	0
SMA/SMK	14	2	16
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	3	3	6
S.1/D.4	3	0	3
S.2	3	0	3
S.3	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>28</b>

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2023

Tabel 1.5 Jumlah ASN Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	19
41-55 Tahun	7
>55 Tahun	2
Jumlah	28

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	Administrator	PNS
2	Sekretaris	1	Pengawas	PNS
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama		Pelaksana	
4	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		Pelaksana	
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Pelaksana	
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		Pelaksana	
7	Bendahara		Pelaksana	
8	Arsiparis Pelaksana		Pelaksana	
9	Pengelola Bahan Perencanaan	1	Pelaksana	PNS
10	Pengelola Teknologi Informasi		Pelaksana	
11	Pengelola Gaji	1	Pelaksana	PNS
12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana	PNS
13	Pengadministrasi Umum	1	Pelaksana	PNS
14	Pengadministrasi Kepegawaian	1	Pelaksana	PNS

15	Pengemudi			
16	Petugas Keamanan			
17	Pramu Bhakti			
18	Analisis Kebencanaan		Fungsional	PPPK
19	Penata Penanggulangan Bencana		Fungsional	PPPK
20	Pranata Komputer		Fungsional	PPPK
21	Pranata Pencarian dan Pertolongan	15	Fungsional	PPPK
22	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Pengawas	PNS
23	Penyuluh Bencana		Pelaksana	
24	Analisis Pengurangan Risiko Bencana		Pelaksana	
25	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini		Pelaksana	
26	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana		Pelaksana	
27	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	Pengawas	PNS
28	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	Pelaksana	PNS
29	Pranata Bencana		Pelaksana	
30	Pengelola Logistik	1	Pelaksana	PNS
31	Pengelola Data Dampak Bencana		Pelaksana	
32	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	Pengawas	PNS
33	Konselor		Pelaksana	
34	Tekhnisi Rancang Bangun	1	Pelaksana	PNS
	Jumlah	38		

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2023

Sarana dan prasarana yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 meliputi :

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kendal

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Tanah	1
2	Alat Besar	14
3	Alat Angkutan	30
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	26
5	Alat Pertanian	7
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	435
7	Alat Studio KOMUNIKASI dan Pemancar	63
8	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	7
9	Alat Laboratorium	48
10	Alat Komputer	60
11	Alat Keselamatan Kerja	95
12	Bangunan Gedung	5
13	Jalan dan Jembatan	5
14	Bangunan Air	1

*Sumber : Data Mutasi Aset Bulan Desember Tahun 2023*

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi anggaran Rp.5.984.154.037,-.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selama tahun 2023, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1 Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang; Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi; Isu-isu Strategis; Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran; Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022;
- 2 Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD; Strategi dan Arah Kebijakan; Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023; Perjanjian Kinerja tahun 2023 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja;
- 3 Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran; Inovasi; serta Penghargaan;
- 4 Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

## **1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022**

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi LKjIP dengan Nomor : 700/143/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kendal mendapatkan skor 74,55 kategori BB (Sangat baik). Ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kendal, yaitu :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen kualitas Perencanaan kinerja diperlukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu;</li> <li>b. Dalam Crosscttting agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain;</li> <li>c. Penyempurnaan IKU disesuaikan format yang ada dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran dan sumber data/penangungjawab serta menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya;</li> </ul>	<p>dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang ada.</p>
2	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen keberadaan dokumen pelaporan kinerja untuk disampaikan tepat waktu ke Bagtan Organisasi Setda Kendal;</p>	<p>Kedepannya akan mengumpulkan laporan sesuai waktu yang dijadwalkan.</p>
3	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen terkait pemanfaatan</p>	<p>Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah</p>

	implementasi SAKIP agar rekomendasi tahun sebelumnya untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.	ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada.
--	--	---

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada

#### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

#### VISI BUPATI KENDAL TAHUN 2021-2026



Penjelasan Visi:

“**Handal**” yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

**VISI :**

**“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”**

**“Unggul”** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya , sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0

**“Makmur”** yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitas, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

**“Berkeadilan”** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

**Misi :**

- Misi 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri pariwisata di Jawa Tengah
- Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
- Misi 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman , nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.

Misi 4 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis. Transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Badan Penanggulangan bencana Daerah dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi keempat yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu 5 (lima tahun) menetapkan empat **tujuan** berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2026, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana.
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dan upaya pengurangan risiko bencana.
- c. Meningkatkan pengelolaan penanggulangan bencana, dengan mengutamakan pelayanan terhadap warga masyarakat terdampak bencana.
- d. Membuat dokumen perencanaan penanggulangan bencana, dan penyebarluasan informasi publik.

Untuk melihat lebih rinci mengenai target masing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran kinerja Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2,74%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	72	72	74	81	81	81

## 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 2.2.1 Strategi

Seperti dalam penjabaran misi keempat pada urusan kebencanaan yaitu mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, maka strategi yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

### 2.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan tahun 2023 : Competitive Kendal. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dalam bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	124,57
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	%	6,85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	74

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 7.732.898.546,- ,melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp 5.984.154.037,-.

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	3.916.281.037,-
2	Program penanggulangan bencana	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	6,85%	2.067.873.000,-
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	100%	
		Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100%	

Uraian	Target		Persentase
	Penetapan	Perubahan	
Belanja Operasi	Rp 5.843.492.746	Rp 4.819.179.037	100%
Belanja Modal	Rp 1.889.405.800	Rp 1.164.975.000	100%
Jumlah	Rp 7.732.898.546	Rp 5.984.154.037	100%

#### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	nilai	74
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	124,57
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Desa	6,85%

## 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu komitmen seluruh stakeholder serta evaluasi kinerja bulanan/triwulanan yang mana dilakukan pemantauan atas capaian kinerja dimasing-masing lini untuk kemudian dilakukan diskusi terhadap permasalahan yang ada.

### 1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

## 2. Simpok

Simpok adalah Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan. Simpok ini berfungsi sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang meliputi : kemajuan kegiatan dan serapan anggaran. Melalui aplikasi Simpok ini dapat diketahui progres pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

## 3. Sieva

Sieva merupakan Sistem Informasi Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah. Melalui sieva ini dapat termonitor pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara berkala.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel**  
**Skala Nilai Peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
a.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
b.	≥85-100%	Baik
c.	≥65-84,99%	Cukup
d.	≥50-64,99%	Kurang
e.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian kinerja tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	nilai	74	74,55	101	81
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	124,57	91,74	136	124,57
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	%	6,85	6,85%	100	6,85

Tabel 3.2  
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	Sumber Data
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74 nilai	74,55	101	Sangat baik	BPBD
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Sangat baik	BPBD
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	baik	BPBD

Tabel diatas menyajikan target dan realisasi masing-masing sasaran pada tahun 2023 yang mana ditampilkan capaian dari masing-masing indikator, seperti :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tercapainya kinerja tahun 2023 untuk indikator sasaran strategis pertama disebabkan oleh tercapainya masing-masing indicator penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, yaitu

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,20 (dua puluh satu koma dua nol), dengan kriteria sebagai berikut :

➤ Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 5,40 (lima koma empat nol) dengan kriteria :

Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan telah mengupload renstra tahun 2016-2021 dan perubahannya, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

➤ Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol) dengan kriteria :

Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang

SMART (Specific, Measurable Achievable, Relevant and Time-bound goals), menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu, Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Setiap unit/ satuan kerja (bidang/bagian di OPD) merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

➤ Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria sebagai berikut:

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung

Kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Setiap unit/ satuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,10 (dua puluh tiga koma satu nol), dengan kriteria sebagai berikut :

➤ Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 5,40 (lima koma empat nol), dengan kriteria :

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja dan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

➤ Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 7,20 (tujuh koma dua nol), dengan kriteria :

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

➤ Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria :

Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocussing) organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli

atas hasil pengukuran kinerja dan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,25 (sebelas koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

➤ Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,10 (dua koma satu nol), dengan kriteria :

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja belum direviu, dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan dan dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu.

➤ Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,15 (tiga koma satu lima), dengan kriteria :

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan

realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

➤ Pemanfaatan

Peiaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6,00 (enam koma nol nol), dengan kriteria :

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai belum sesuai, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,00 (delapan belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

➤ Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,0 (empat koma nol), dengan kriteria :

Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.

➤ Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

➤ Pemanfaatan

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 8,75 (delapan koma tujuh lima), dengan kriteria sebagai berikut:

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal baru sebagian yang ditindaklanjuti, telah terjadi

peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana

Sasaran strategis yang kedua ini mempunyai 2 indikator, yaitu

a. Indeks Risiko Bencana (IRB)

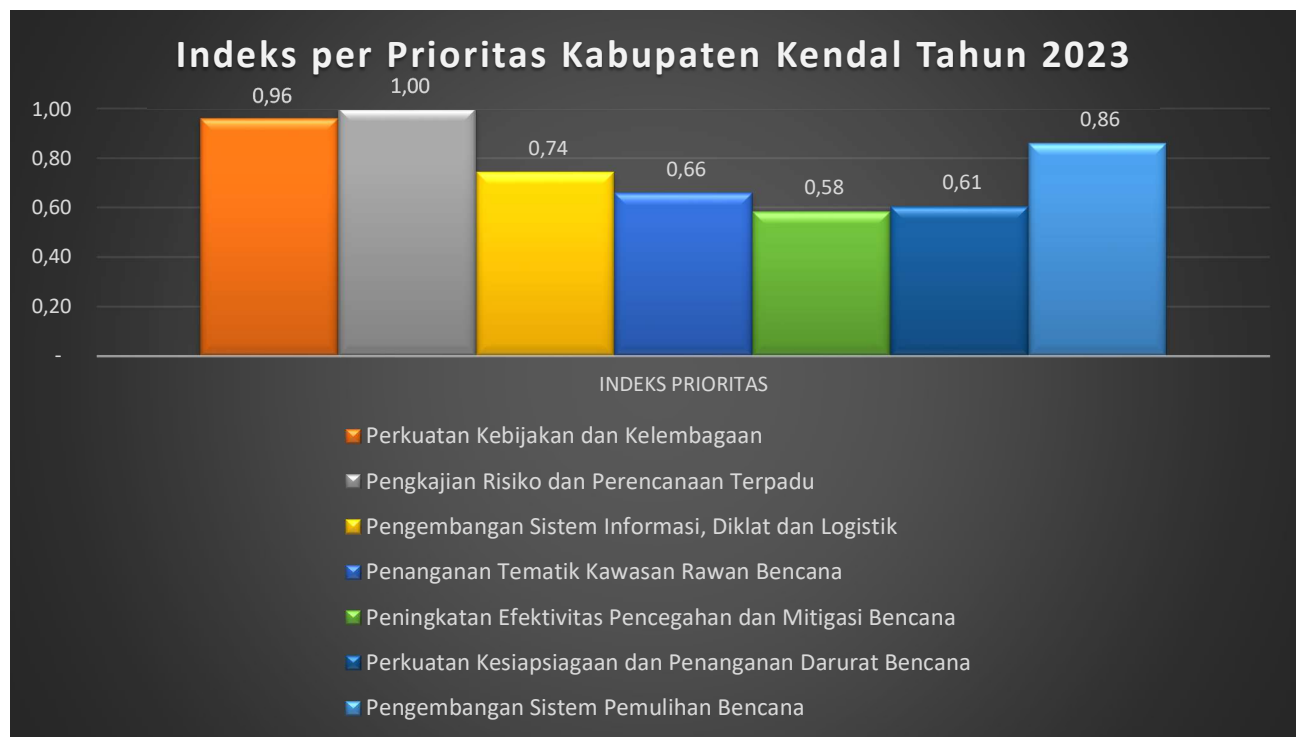
Pada tahun 2022, target Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal adalah 124,57 dengan realisasi 97,9 sehingga tingkat capaian sebesar 127%. Pada tahun 2023, target Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal adalah 124,57 dengan realisasi 91,74 sehingga tingkat capaian sebesar 136%. Pada perkembangannya, nilai IRB dijadikan sebagai indikator kinerja utama oleh beberapa pemerintah daerah, yang mana berimplikasi pada indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) perlu disinergikan dengan program dan kegiatan di daerah. Indeks Ketahanan Daerah terdiri dari tujuh prioritas, yaitu :

- Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

- Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Penilaian dari masing-masing prioritas tersebut pada tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.96	0.70	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1.00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.74		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.66		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.58		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.61		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.86		



b. Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tersirat bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama semua unsur, yakni pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012). Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya. Pada Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan suatu desa karena pendekatan satu sektor saja terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah :

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.

4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan PB. Strategi untuk mewujudkan Destana antara lain meliputi :

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.

6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya Pengurangan Risiko Bencana yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1 Bencana adalah urusan bersama,
- 2 Berbasis PRB,
- 3 Pemenuhan hak masyarakat,
- 4 Masyarakat menjadi pelaku utama,
- 5 Dilakukan secara partisipatoris,
- 6 Mobilisasi sumber daya lokal,
- 7 Inklusif,
- 8 Berlandaskan kemanusiaan,

- 9 Keadilan dan kesetaraan gender,
- 10 Keberpihakan pada kelompok rentan,
- 11 Transparansi dan akuntabilitas,
- 12 Kemitraan,
- 13 Multi ancaman,
- 14 Otonomi dan desentralisasi pemerintahan,
- 15 Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan
- 16 Diselenggarakan secara lintas sektor

Pada tahun 2023, pembentukan Desa Tangguh Bencana dilaksanakan di:

1. Desa Kedungboto Kecamatan Limbangan
2. Desa Gondang Kecamatan Limbangan
3. Desa Kalibareng Kecamatan Patean
4. Desa Gentinggunung Kecamatan Sukorejo
5. Desa Harjodowo Kecamatan Sukorejo

Pada tabel capaian kinerja diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kategori Sangat Baik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sudah sangat baik.

Daftar Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kendal tahun 2016-2023.

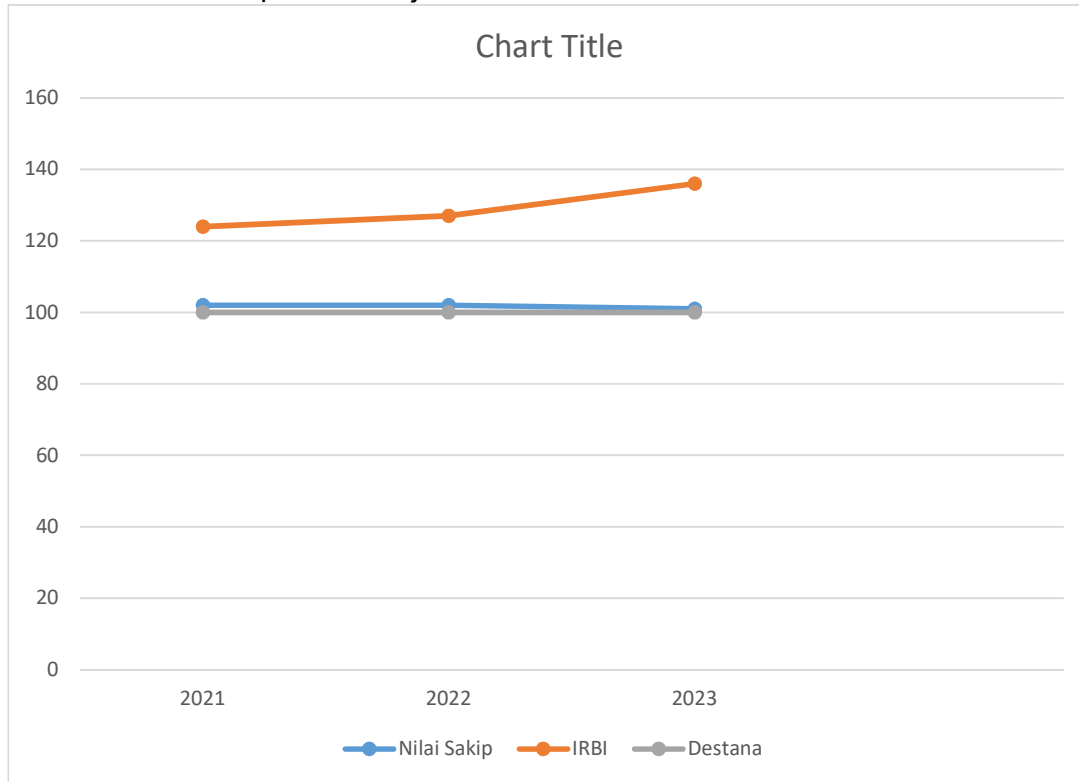
<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KEL</b>	<b>TAHUN</b>	<b>ANCAMAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>
1	Plantungan	Tlogopayung	2016	Longsor	APBN
2	Kendal Kota	Kebondalem	2016	Banjir	APBN
3	Singorojo	Cening	2016	Longsor	APBN
4	Limbangan	Ngresepbalong	2019	Longsor, Kekeringan	APBD Prov.

5	Patebon	Lanji	2020	Banjir	APBD Kab. Kendal
6	Plantungan	Tirtomulyo	2021	Longsor	APBD Prov.
7	Gemuh	Sojomerto	2021	Banjir, Longsor	APBD Prov.
8	Brangsong	Sidorejo	2021	Banjir	APBD Kab. Kendal
9	Patebon	Pidodokulon	2021	Banjir	APBD Kab. Kendal
10	Plantungan	Manggungmangu	2022	Longsor, Kekeringan, Angin Putting Beliung	APBD Kab. Kendal
11	Patean	Sidokumpul	2022	Longsor, Angin Putting Beliung	APBD Kab. Kendal
12	Plantungan	Mojoagung	2022	Longsor, Angin Putting Beliung, Pergerakan Tanah	APBD Kab. Kendal
13	Kaliwungu Selatan	Protomulyo	2022	Banjir	APBD Kab. Kendal
14	Weleri	Manggungsari	2022	Banjir	APBD Kab. Kendal
15	Limbangan	Kedungboto	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
16	Limbangan	Gondang	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
17	Patean	Kalibareng	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
18	Sukorejo	Gentinggunung	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
19	Sukorejo	Harjodowo	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	72	73,20	102	72	73,20	102	74	74,55	101
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	100,40	124	124,57	97,9	127	124,57	91,74	136
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2,74%	2,74%	100	6,85%	6,85%	100	6,85%	6,85%	100

Gambar Grafik Capaian Kinerja



Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sarannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di setiap tahunnya selalu ada peningkatan. Berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 73,2; 73,2; dan 74,55. Hasil penilaian ini merupakan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Kendal yang didukung dengan dokumen Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sudah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Untuk capaian Nilai Sakip selama 3 tahun berturut-turut diatas 100%;
- b. Adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal.
- c. Indeks Risiko Bencana (IRB) relatif turun antara tahun 2021 sampai dengan 2023, mulai dari 100,40; 97,9; dan 91,74. Hal ini tidak lepas dari komitmen dan kerja sama berbagai pihak dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan dan mitigasi serta penanganan bencana di Kabupaten Kendal.

Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74,55	81	92	1%
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,74	124,57	136	3%
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	23,28%	42,47%	55	12%

Analisis perbandingan capaian kinerja sasaran strategis ke-1 dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah :

1. Realisasi kinerja sasaran strategis 1 pada indikator Nilai Sakip sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 81 dan terealisasi 74,55 dengan capaian sebesar 92%.
2. Realisasi kinerja sasaran strategis 2 pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 124,57 dan terealisasi 91,74 dengan capaian sebesar 136%.
3. Realisasi kinerja sasaran strategis 3 pada indikator Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 42,47% dan terealisasi 23,28% dengan capaian sebesar 55%.

Tabel 3.5 Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional.

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Nasional	Capaian %
1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,74	124,57	136

Indeks Risiko Bencana merupakan standart nasional yang penghitungannya dilakukan oleh BNPB.

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74	74,55	101	Proses dimulai dari perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku	
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Pengukuran Indeks Risiko Bencana (IRB) diawali dengan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 prioritas, yang kemudian pengukuran IKD digunakan sebagai nilai kapasitas daerah	
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang	6,85%	6,85%	100	Target pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	

			terbentuk				sebanyak 6.85% (5 desa dari 73 desa rawan bencana) dan telah dilaksanakan pada tahun 2023	
--	--	--	-----------	--	--	--	---	--

Analisis penyebab keberhasilan kinerja dapat dikatakan sebagai sebuah komitmen pimpinan dan segenap pegawai serta kerja sama berbagai pihak dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi kinerja. Dibutuhkan sinergi yang baik diantara pihak-pihak tersebut dalam mewujudkan kinerja organisasi yang maksimal.

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %	
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74	74,55	101	3.916.281.037	3.403.638.161	87	13
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	2.067.873.000	1.850.494.465	89	11
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100				

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis 1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1

sebesar Rp. 3.403.638.161,- atau sebesar 87% dari total pagu sebesar Rp. 3.916.281.037,. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 13% dari pagu yang dialokasikan.

2. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2 sebesar Rp.1.850.494.465,- atau sebesar 89% dari total pagu sebesar Rp.2.067.873.000,. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 11% dari pagu yang dialokasikan

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74 nilai	74,55	101	Menunjang
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	29 orang/bulan	100	Menunjang
		- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100	Menunjang
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100	Menunjang
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100	Menunjang
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 paket	250 paket	100	Menunjang
		- Penyediaan	Jumlah Paket	1 Jenis	1 Jenis	100	Menunjang

		Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	25 laporan	100	Menunjang
		- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	100	Menunjang
		- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	33	Menunjang
		- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	100	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	100	Menunjang
		- Penyediaan jasa pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit	15 Unit	100	Menunjang

		biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
		- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	100	Menunjang
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Menunjang
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	Menunjang
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 Orang	200 Orang	100	Menunjang
		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	40 Orang	100	Menunjang
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang

	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				
	- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	1 Jenis	1 Jenis	100	Menunjang
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	100	Menunjang
	- Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	2000 Orang	97.030 Orang	4.852	Menunjang
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1500 orang 12 Laporan	9.130 orang 12 Laporan	609 100	Menunjang
	- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
	- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Menunjang

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal pada tahun anggaran 2023, di dukung dengan anggaran perubahan sebesar Rp.5.984.154.037,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Laporan Realisasi Keuangan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
A	<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>5.984.154.037</b>	<b>5.254.132.626</b>	<b>88</b>	<b>95,24</b>
1	<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.916.281.037</b>	<b>3.403.638.161</b>	<b>87</b>	<b>94,86</b>
a	<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.091.286.637</b>	<b>1.900.420.579</b>	<b>91</b>	<b>100</b>
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.932.566.637	1.746.949.379	90	100
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.720.000	153.471.200	97	100
b	<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>453.820.400</b>	<b>383.950.257</b>	<b>85</b>	<b>91,3</b>
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.544.900	67.266.350	93	100
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.165.500	27.586.500	91	100
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.110.000	42.651.000	53	51,31
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	18.754.800	94	100
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	227.691.607	91	100
c	<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>796.250.000</b>	<b>757.450.000</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	688.250.000	659.000.000	96	100
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.000.000	14.800.000	99	100
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.000.000	83.650.000	90	100

d	<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.593.000</b>	<b>216.241.895</b>	<b>86</b>	<b>100</b>
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100	100
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000	183.689.615	83	100
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.093.000	28.052.280	100	100
e	<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>322.331.000</b>	<b>145.575.430</b>	<b>45</b>	<b>49,8</b>
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.011.000	89.794.130	35	37,89
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.320.000	26.968.400	83	100
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	28.812.900	96	98,92
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.067.873.000</b>	<b>1.850.494.465</b>	<b>89</b>	<b>95,95</b>
a	<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>183.100.000</b>	<b>152.555.700</b>	<b>83</b>	<b>98,69</b>
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	183.100.000	152.555.700	83	98,69
b	<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>792.343.000</b>	<b>658.262.246</b>	<b>83</b>	<b>89,75</b>
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	71.896.500	96	100
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	290.423.000	209.012.300	72	72,02
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	48.750.000	98	100
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	301.920.000	254.905.500	84	100
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000	73.697.946	98	100
c	<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>810.500.000</b>	<b>791.133.875</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	599.600.000	596.528.950	99	100
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	210.900.000	194.604.925	92	100
d	<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>281.930.000</b>	<b>248.542.644</b>	<b>88</b>	<b>100</b>
	1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	90.000.000	88.831.896	99	100
	1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	191.930.000	159.710.748	83	100
		<b>TOTAL</b>	<b>5.984.154.037</b>	<b>5.254.132.626</b>	<b>88</b>	<b>95,24</b>

Realisasi anggaran pada tahun 2023 pada 2 program/kegiatan tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3.916.281.037,- terserap Rp. 3.403.638.161,- (87%) sedangkan Program Penanggulangan Bencana dari anggaran Rp.2.067.873.000,- terserap Rp.1.850.494.465,- (89%). Dari total anggaran yang disediakan Rp.5.984.154.037 terserap Rp.5.254.132.626 atau terserap 88%. Dapat dikatakan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sudah baik.

### 3.3 Inovasi

Berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana dalam rangka mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal;  
Secara geografis, Kabupaten Kendal terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah dan pantai. Hal ini berdampak pada ancaman bencana di Kabupaten Kendal yang secara umum meliputi tanah longsor, banjir dan gelombang pasang. Pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama pencegahan dan mitigasi bencana yang tentunya hal ini akan berimplikasi pada berkurangnya kerugian akibat bencana.

2. Pemasangan EWS dalam rangka meningkatkan peringatan dini bencana;  
Sistem peringatan dini bencana adalah serangkaian sistem untuk menginformasikan terjadinya suatu peristiwa alam yang dapat berupa bencana atau tanda alam lainnya. Penyebaran informasi tentang kondisi bahaya merupakan muara dari suatu alur proses analisis data-data mentah tentang sumber bencana dan sintesis dari berbagai pertimbangan. Melalui analisis dan sintesis yang berkualitas, ketepatan informasi mengenai risiko bencana pun dapat diperoleh. Oleh sebab itu, sistem peringatan dini memiliki dua bagian utama, yakni bagian hulu yang merupakan upaya-upaya untuk mengemas data-data menjadi informasi yang tepat serta bagian hilir yang berupa usaha agar informasi dapat disampaikan dengan cepat. Beberapa tujuan sistem peringatan dini bencana adalah :
  - a. Mengetahui daerah-daerah rawan bencana di Indonesia,
  - b. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan aksi masyarakat dan aparat terhadap fenomena bencana, gejala awal bencana, dan mitigasinya,
  - c. Suatu kawasan akan lebih tertata dengan mempertimbangkan potensi bencana,
  - d. Memberikan pemahaman akan berbagai hal terkait bencana.
3. Aplikasi Siaga BPBD  
Aplikasi Siaga BPBD ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pelaporan kejadian bencana dari masyarakat. Pelaporan kejadian bencana melalui aplikasi ini dilakukan melalui telepon genggam (HP).

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Baik. Capaian sasaran pada setiap tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Nilai Sakip mendapatkan predikat nilai baik,

Sasaran 2 : Indeks Risiko Bencana (IRB) mendapatkan predikat nilai baik,

Sasaran 3 : Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk mendapatkan predikat nilai baik.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah dicapai dengan kategori baik.

### 4.2 Rekomendasi

Meskipun sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun tetap diperlukan perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kendal, Januari 2024

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**



**AL SUTARIYO, S.T., M.A.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700505/199803 1 012